



Article Informations  
Corresponding Email:  
gustinaimel589@gmail.com

Received: 12/08/2025; Accepted:  
10/01/2026; Published: 26/02/2026

## **STRATEGI GEOEKONOMI JEPANG MELALUI *FREE AND OPEN INDO-PACIFIC* (FOIP) DI ASIA TENGGARA SEBAGAI RESPONS TERHADAP EKSPANSI PENGARUH TIONGKOK (2020–2024)**

**Imel Gustina**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis strategi Jepang melalui konsep *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) sebagai instrumen geoekonomi untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara pada periode 2020–2024, dengan fokus pada Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji implementasi FOIP melalui proyek infrastruktur, bantuan pembangunan resmi (*Official Development Assistance/ODA*), dan diplomasi ekonomi Jepang, serta membandingkannya dengan pendekatan *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FOIP menjadi alternatif pembangunan kawasan yang menekankan supremasi hukum, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan, meskipun efektivitasnya bervariasi antarnegara. Jepang berhasil memperkuat posisi strategisnya melalui proyek infrastruktur besar dan kemitraan ekonomi, namun menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran dan persaingan ketat dengan Tiongkok. Simpulan penelitian menegaskan bahwa FOIP berperan sebagai strategi *soft balancing* yang memadukan kepentingan ekonomi dan politik Jepang untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.

**Kata Kunci:** *Free and Open Indo-Pacific*, geoekonomi, Jepang, *Belt and Road Initiative*, Asia Tenggara

### **Abstract**

*This study analyzes Japan's strategy through the Free and Open Indo-Pacific (FOIP) concept as a geo-economic instrument to counter China's influence in Southeast Asia during the 2020–2024 period, focusing on Indonesia, Vietnam, and the Philippines. Using a descriptive qualitative method with a literature review approach, the study examines FOIP's implementation through infrastructure projects, Official Development Assistance (ODA), and Japan's economic diplomacy, as well as comparing it with China's Belt and Road Initiative (BRI). The findings indicate that FOIP serves as an alternative regional development framework that emphasizes the rule of law, good*

*governance, and sustainability, although its effectiveness varies across countries. Japan has strengthened its strategic position through major infrastructure projects and economic partnerships, yet faces challenges such as budget limitations and intense competition with China. The results highlight that FOIP functions as a soft balancing strategy integrating Japan's economic and political interests to maintain stability in Southeast Asia.*

**Keywords:** *Free and Open Indo-Pacific, geoeconomics, Japan, Belt and Road Initiative, Southeast Asia*

## **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Asia Tenggara menjadi arena persaingan strategis antara kekuatan besar, khususnya Jepang dan Tiongkok. Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) berupaya memperluas pengaruhnya di bidang ekonomi, politik, dan keamanan, terutama melalui proyek infrastruktur berskala besar.<sup>1</sup> Di sisi lain, Jepang memanfaatkan konsep *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) sebagai instrumen geoekonomi untuk memperkuat posisinya sekaligus menyeimbangkan pengaruh Tiongkok. FOIP menekankan prinsip supremasi hukum, kebebasan navigasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan berkelanjutan, yang selaras dengan kebutuhan pembangunan kawasan.<sup>2</sup> Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana FOIP diimplementasikan di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Vietnam, dan Filipina, serta efektivitasnya dibandingkan BRI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan, memanfaatkan sumber dari jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan publikasi lembaga riset. Analisis difokuskan pada kebijakan, proyek infrastruktur, bantuan pembangunan resmi (*Official Development Assistance/ODA*), dan diplomasi ekonomi Jepang.<sup>3</sup> Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas FOIP dan BRI secara terpisah, namun kajian yang membandingkan efektivitas

---

<sup>1</sup> National Development and Reform Commission. "Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road." *Government of the People's Republic of China*, 28 Mar. 2015, [en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330\\_669367.html](http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html).

<sup>2</sup> Ministry of Foreign Affairs of Japan. "Free and Open Indo-Pacific (FOIP)." *MOFA Japan*, 2023, [www.mofa.go.jp/policy/page25e\\_000278.html](http://www.mofa.go.jp/policy/page25e_000278.html).

<sup>3</sup> Sato, Yoichiro. "Japan's ODA and Strategic Engagement in Southeast Asia." *East Asia Forum*, 17 Aug. 2021, [www.eastasiaforum.org](http://www.eastasiaforum.org).

keduanya dalam konteks geoekonomi Asia Tenggara masih terbatas.<sup>4</sup> Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi FOIP sebagai bentuk *soft balancing* terhadap BRI, sekaligus memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pemahaman dinamika geopolitik dan geoekonomi di kawasan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. EKSAPANSI PENGARUH TIONGKOK DI ASIA TENGGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KAWASAN INDO-PASIFIK**

Sejak diperkenalkannya kebijakan “Reformasi dan Terbuka” oleh Deng Xiaoping pada akhir 1970-an, Tiongkok mengalami transformasi mendasar dari ekonomi agraris menjadi kekuatan industri dan keuangan global. Dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok berada pada kisaran 6–8% per tahun, menjadikannya sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Pencapaian ini menempatkan Tiongkok sebagai mitra dagang utama bagi berbagai kawasan strategis, termasuk Asia Tenggara.<sup>5</sup>

Posisi Tiongkok sebagai pusat ekonomi regional diperkuat oleh meningkatnya hubungan perdagangan dan investasi dengan negara-negara Asia Tenggara. Pada tahun 2022, Tiongkok tercatat sebagai mitra dagang terbesar ASEAN, dengan total nilai perdagangan bilateral mencapai lebih dari USD 722 miliar. Di samping itu, aliran investasi langsung Tiongkok ke kawasan ini mencapai USD 15,4 miliar, menjadikannya sebagai salah satu investor utama dalam sektor infrastruktur dan energi.<sup>6</sup> Angka-angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok tidak hanya berdampak pada perekonomian domestik, tetapi juga telah memperluas jangkauan pengaruhnya ke kawasan sekitarnya.

---

<sup>4</sup> Smith, Sheila A. “Japan’s Strategic Balancing in Southeast Asia: FOIP vs. BRI.” *Journal of Asian Security and International Affairs*, vol. 10, no. 1, 2023, pp. 56–78.

<sup>5</sup> Asia Society. “The Rise of China’s Economy.” *Asia Society*, 2023. <https://asiasociety.org/policy-institute/rise-chinas-economy> ↵

<sup>6</sup> Laotian Times. “China Becomes ASEAN’s Top Trading Partner.” *Laotian Times*, 2023. <https://laotiantimes.com/2023/07/05/china-becomes-aseans-top-trading-partner> ↵

Lebih dari sekadar mitra ekonomi, Tiongkok memanfaatkan kekuatan ekonominya sebagai alat dalam diplomasi pembangunan atau *economic statecraft*. Strategi ini diwujudkan melalui inisiatif ambisius seperti *Belt and Road Initiative* (BRI), yang diluncurkan pada tahun 2013. Melalui BRI, Tiongkok menginisiasi berbagai proyek infrastruktur besar di Asia Tenggara termasuk pembangunan jalur kereta api di Laos, pelabuhan di Indonesia, serta proyek energi di Filipina dan Vietnam. Inisiatif ini tidak hanya mempererat konektivitas fisik, tetapi juga memperkuat ketergantungan ekonomi negara-negara mitra terhadap Tiongkok.<sup>7</sup>

Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan prioritas dalam politik luar negeri Tiongkok karena faktor geografis dan kedekatan ekonomi. Hubungan ini ditandai dengan peningkatan intensitas pertemuan bilateral, inisiatif kerja sama multilateral, serta partisipasi aktif Tiongkok dalam berbagai forum regional seperti ASEAN+1, ASEAN Regional Forum (ARF), dan East Asia Summit (EAS). Melalui pendekatan ini, Tiongkok berupaya membangun citra sebagai mitra pembangunan yang setara dan responsif terhadap kebutuhan domestik negara-negara Asia Tenggara, bukan sebagai kekuatan dominan yang hegemonik.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, Tiongkok juga menyesuaikan pendekatannya secara fleksibel terhadap karakteristik masing-masing negara mitra. Hubungan dengan Indonesia, misalnya, dibangun dengan menekankan kerja sama maritim dan investasi di sektor energi. Sementara dengan Kamboja, pendekatannya lebih berfokus pada dukungan politik dan bantuan infrastruktur sebagai imbal balik atas posisi Kamboja yang cenderung pro-Tiongkok dalam isu Laut Tiongkok Selatan. Relasi yang dibangun bersifat hirarkis, namun tetap adaptif terhadap kepentingan dan dinamika domestik

---

<sup>7</sup> Bharti, Neelam, and Kumari, Rachana. "China's Economic Diplomacy Through the Belt and Road Initiative in Indo-Pacific Region." *Asia Pacific Journal of Regional Science*, SpringerLink, 2024. <https://link.springer.com/article/10.1007/s41685-024-00375-6> ↵

<sup>8</sup> Li, Mingjiang. "China's Rise and Regional Strategy: Power, Interdependence and Identity." *East Asian Policy*, vol. 5, no. 4, 2013, pp. 24–32. ↵

negara-negara mitra (*hierarchical yet adaptive*), suatu pendekatan khas yang merefleksikan fleksibilitas strategi diplomasi Tiongkok di Asia Tenggara.<sup>9</sup>

Dengan strategi yang bersifat multidimensi, Tiongkok tidak hanya memperluas jejaring pengaruhnya di Asia Tenggara tetapi juga secara aktif menyeimbangkan kekuatan politik regional yang selama ini cenderung didominasi oleh aktor-aktor Barat. Pendekatan diplomasi yang terintegrasi dengan kekuatan ekonomi menjadi modal utama Tiongkok dalam meraih kepercayaan politik di kawasan, sekaligus membentuk zona pengaruh yang strategis sebagai bagian dari ambisi geopolitik yang lebih luas.

Peluncuran *Belt and Road Initiative* (BRI) pada tahun 2013 menandai tonggak penting dalam pergeseran kebijakan luar negeri Tiongkok dari pendekatan bilateral yang tertutup menjadi strategi global yang proaktif. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun jaringan konektivitas global melalui dua koridor utama: *Silk Road Economic Belt* (jalur darat) di kawasan Eurasia dan *21st Century Maritime Silk Road* (jalur laut), yang meliputi jalur laut dari Asia Timur ke Asia Tenggara, Samudra Hindia, Afrika, hingga Eropa.<sup>10</sup> Dengan pendekatan ini, Tiongkok tidak hanya mengembangkan jalur logistik dan infrastruktur lintas kawasan, tetapi juga memperluas pengaruh politik dan ekonominya melalui kerja sama pembangunan lintas negara.

Ekspansi maritim dan infrastruktur Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, terutama melalui *Belt and Road Initiative* (BRI), telah menyebabkan perubahan nyata dalam struktur kekuasaan di Asia Tenggara. Proyeksi kekuatan Tiongkok tidak hanya melalui jalur darat seperti kereta dan pelabuhan tetapi juga mencakup pengembangan basis militer strategis, seperti fasilitas semi-permanen di pangkalan Ream, Kamboja, yang memungkinkan dominasi maritim di Selat Malaka dan Laut China Selatan.<sup>11</sup> Selain itu, strategi "*String of Pearls*", jaringan pelabuhan strategis dari Sri Lanka hingga kepulauan Pasifik, menunjukkan bagaimana Tiongkok

---

<sup>9</sup> Stromseth, Jonathan. "Don't Make Us Choose: Southeast Asia in the Throes of US-China Rivalry." *Brookings Institution Report*, 2019. <https://www.brookings.edu/articles/dont-make-us-choose-southeast-asia-in-the-throes-of-us-china-rivalry> ↵

<sup>10</sup> Rolland, Nadège. *China's Eurasian Century? Political and Strategic Implications of the Belt and Road Initiative*. National Bureau of Asian Research, 2017.

<sup>11</sup> *A Chinese Naval Base in Cambodia Signals a New Era of Competition in the Asia-Pacific Region*. *Time*, 9 June 2022.

memperluas cakupan logistik dan militer untuk memperkuat pengaruhnya di seluruh jalur laut utama Indo-Pasifik.<sup>12</sup>

## **2. KONSEP DAN KERANGKA STRATEGI FOIP JEPANG**

*Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) merupakan kerangka kerja sama strategis yang diluncurkan oleh Jepang sebagai respons terhadap dinamika geopolitik dan geoekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Inisiatif ini pertama kali diumumkan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Konferensi Internasional Tokyo tentang Pembangunan Afrika (Tokyo International Conference on African Development/TICAD VI) di Nairobi, Kenya, pada bulan Agustus 2016.<sup>13</sup>

Peluncuran FOIP tidak dapat dilepaskan dari dinamika meningkatnya pengaruh Tiongkok, khususnya melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI). Jepang memandang perlu adanya keseimbangan strategis yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga pendekatan geoekonomi untuk menegaskan kembali perannya sebagai aktor utama di kawasan.<sup>14</sup> FOIP pun menjadi alat bagi Jepang untuk mengedepankan diplomasi pembangunan dan penguatan konektivitas sebagai sarana untuk menyaingi pengaruh Tiongkok yang masif di negara-negara berkembang.<sup>15</sup>

Dalam konteks ini, Asia Tenggara menjadi kawasan yang sangat strategis bagi implementasi FOIP Jepang. Letaknya yang berada di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan transit utama jalur pelayaran global *Sea Lines of Communication* (SLOCs), termasuk jalur energi dan perdagangan Jepang.<sup>16</sup> Negara-negara Asia Tenggara juga merupakan mitra dagang penting Jepang

---

<sup>12</sup> "China's maritime expansion has shifted the balance of power in the Indo-Pacific region..." *Journal of Global Peace and Security Studies*, vol. 4, no. 1, 2023.

<sup>13</sup> Ministry of Foreign Affairs of Japan. "Address by Prime Minister Shinzo Abe at the Opening Session of the Sixth Tokyo International Conference on African Development (TICAD VI)," 27 August 2016. [https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e\\_000496.html](https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e_000496.html)

<sup>14</sup> Zhao, Suisheng. "China's Belt and Road Initiative and the Global Economy." *Journal of Contemporary China* 28, no. 119 (2019): 319–335.

<sup>15</sup> Hosoya, Yuichi. "FOIP 2.0: The Evolution of Japan's Free and Open Indo-Pacific Strategy." *Asia-Pacific Review* 27, no. 2 (2020): 18–28.

<sup>16</sup> Ichihara, Maiko. "Japan's FOIP and Southeast Asia: Between Power and Principles." *The Pacific Review* 35, no. 3 (2022): 482–506.

serta wilayah yang sangat rentan terhadap tekanan geoekonomi dari Tiongkok melalui skema pinjaman infrastruktur dan proyek BRI.<sup>17</sup>

Jepang memandang bahwa keberhasilan FOIP sangat bergantung pada keterlibatan aktif Asia Tenggara. Oleh karena itu, Jepang menempatkan kawasan ini sebagai prioritas utama, baik melalui kerja sama bilateral maupun melalui kemitraan strategis dengan ASEAN.<sup>18</sup> Seperti yang ditegaskan dalam “*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*” (AOIP), Jepang mendukung sentralitas ASEAN dan berupaya menyelaraskan FOIP dengan visi kawasan tersebut.<sup>19</sup> Hal ini juga tercermin dalam berbagai proyek konkret seperti pembangunan infrastruktur konektivitas di Indonesia, penguatan kapasitas maritim di Filipina, serta dukungan pembangunan ekonomi di Vietnam.

Pada intinya, FOIP dibangun atas tiga pilar utama: 1) supremasi hukum, kebebasan navigasi, dan perdagangan bebas; 2) kemakmuran ekonomi melalui konektivitas; dan 3) komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan melalui pembangunan kapasitas keamanan maritim.<sup>20</sup> Selanjutnya, FOIP juga mengusung nilai-nilai inklusivitas dan keragaman, di mana Jepang secara eksplisit menyatakan visi FOIP sebagai kerangka kerja sama yang tidak eksklusif dan menghormati pluralitas tiap negara.<sup>21</sup> FOIP dirancang agar selaras dengan AOIP ASEAN, memperkuat sentralitas ASEAN, mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan memperluas konektivitas kawasan sebagai “*good international public goods*”.<sup>22</sup>

Melalui kerangka ini, Jepang memainkan peran strategis dalam membangun alternatif tata kelola kawasan yang berbasis aturan, inklusif,

---

<sup>17</sup> Salidjanova, Nargiza, and Iacob Koch-Weser. "China's Economic Ties with ASEAN: A Country-by-Country Analysis." U.S.-China Economic and Security Review Commission, 2015.

<sup>18</sup> Suehiro, Akira. "Japan's FOIP Strategy and Southeast Asia: In Search of a Regional Cooperation Framework." *Journal of Contemporary East Asia Studies* 9, no. 2 (2020): 177–195.

<sup>19</sup> ASEAN. “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.” ASEAN Secretariat, 2019. [↵](#)

<sup>20</sup> Ministry of Foreign Affairs of Japan. *Free and Open Indo-Pacific (FOIP)*. MOFA Japan, 2022. [https://www.mofa.go.jp/policy/page25e\\_000278.html](https://www.mofa.go.jp/policy/page25e_000278.html)

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> ASEAN. *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)*. ASEAN Secretariat, 2019. [https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific\\_FINAL\\_22062019.pdf](https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf)

dan fokus pada kepentingan jangka panjang sebagai *counterpoint* terhadap pendekatan investasi Tiongkok yang lebih pragmatis dan politis.

Konsep *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang diinisiasi Jepang tidak hanya sekadar kerangka kerja sama kawasan, tetapi juga merepresentasikan strategi geoekonomi yang kompleks. Geoekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh Edward Luttwak, merupakan penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan geopolitik, yaitu pencapaian kepentingan nasional melalui jalur non-militer dan non-koersif.<sup>23</sup> Dalam konteks FOIP, Jepang memanfaatkan jalur ekonomi seperti perdagangan, bantuan pembangunan, dan investasi infrastruktur untuk memperkuat pengaruh regionalnya di tengah meningkatnya kompetisi dengan Tiongkok, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Penerapan FOIP juga selaras dengan kepentingan domestik Jepang. Jepang sebagai negara yang sangat tergantung pada perdagangan internasional dan pasokan energi, sangat bergantung pada kestabilan kawasan Indo-Pasifik, terutama jalur laut yang menghubungkan Timur Tengah–Asia Tenggara–Asia Timur. Dengan memperkuat kerja sama infrastruktur dan investasi melalui FOIP, Jepang menjaga kepentingan vitalnya terkait rantai pasok global. Hal ini ditegaskan dalam dokumen *Diplomatic Bluebook 2021*, di mana FOIP dijabarkan sebagai strategi utama Jepang dalam menjaga arsitektur kawasan yang stabil dan terbuka.<sup>24</sup> Sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan, Jepang menyadari pentingnya menjaga keseimbangan kekuatan (*balance of power*) di Asia Tenggara, terutama dalam menghadapi ekspansi pengaruh Tiongkok melalui inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI). Untuk itu, Jepang mengadopsi strategi *soft balancing* melalui konsep *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP), yakni dengan cara memperkuat kemitraan regional tanpa melakukan konfrontasi langsung. Pendekatan ini didesain untuk memperluas pengaruh strategis Jepang secara damai dan bertahap, dengan tetap menjaga stabilitas kawasan

---

<sup>23</sup> Luttwak, Edward N. *From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce*. The National Interest, no. 20, 1990, pp. 17–23.

<sup>24</sup> Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA). *Diplomatic Bluebook 2021*, 2021.

serta memperhatikan sensitivitas politik negara-negara ASEAN terhadap rivalitas kekuatan besar.<sup>25</sup>

### **3. IMPLEMENTASI STRATEGI GEOEKONOMI FOIP DI ASIA TENGGARA (2020–2024)**

Penelitian ini menggunakan Neorealisme sebagai landasan utama. Neorealisme, sebagaimana dirumuskan oleh Kenneth Waltz, berangkat dari asumsi bahwa sistem internasional bersifat anarki, negara adalah aktor utama, dan setiap negara bertindak secara rasional demi mempertahankan kelangsungan hidupnya (survival) dalam sistem yang tidak menjamin keamanan kolektif.<sup>26</sup> Dalam logika neorealisme, negara tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pihak lain, sehingga *self-help* menjadi prinsip utama dalam menjaga keamanan dan kestabilan posisi strategisnya.

Jepang, sebagai negara besar non-nuklir dengan kepentingan vital di Asia Tenggara, memanfaatkan FOIP sebagai mekanisme *self-help* untuk menyeimbangi kebangkitan Tiongkok. Dalam kerangka ini, strategi FOIP dipahami sebagai bentuk respons terhadap ketidakseimbangan kekuatan regional yang dipicu oleh ekspansi ekonomi-politik Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* (BRI). Dengan menggunakan pendekatan *Balance of Power*, strategi FOIP ditujukan untuk menciptakan kembali keseimbangan kekuatan regional agar tidak jatuh ke dalam dominasi tunggal oleh satu aktor.<sup>27</sup>

Di sisi lain, implementasi FOIP di lapangan lebih banyak memanfaatkan pendekatan Geoekonomi. Pendekatan ini memandang instrumen ekonomi sebagai alat untuk mencapai tujuan geopolitik, menggantikan peran militer tradisional dalam persaingan antarnegara. Jepang menggunakan investasi, bantuan pembangunan, serta dukungan infrastruktur sebagai alat untuk membangun pengaruh strategis di negara-

---

<sup>25</sup> Céline Pajon, "Japan in Southeast Asia: Looking for a Balanced Indo-Pacific", Institut français des relations internationales (IFRI), 11 Desember 2019, <https://www.ifri.org/en/publications/publications-ifri/articles-ifri/japan-south-east-asia-looking-balanced-indo-pacific>.

<sup>26</sup> Waltz, Kenneth N. *Theory of International Politics*. McGraw-Hill, 1979.

<sup>27</sup> Walt, Stephen M. *The Origins of Alliances*. Cornell Studies in Security Affairs, Cornell University Press, 1987.

negara Asia Tenggara.<sup>28</sup> Oleh karena itu, geoekonomi dalam konteks FOIP tidak hanya bertujuan mendorong pembangunan kawasan, tetapi juga sebagai alat kompetisi untuk mempertahankan tatanan regional yang bebas dan terbuka sesuai kepentingan Jepang.

#### **a. Implementasi FOIP di Indonesia**

Letak geografis Indonesia yang strategis di kawasan Asia Tenggara memberikan posisi penting dalam kancah geopolitik dan geoekonomi regional. Sebagai ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia memiliki peran penting dalam menghubungkan kepentingan berbagai kekuatan besar, termasuk Jepang. Dalam konteks ini, implementasi strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) oleh Jepang di Indonesia menjadi bagian dari upaya geoekonomi yang lebih luas untuk memperkuat konektivitas, stabilitas, dan kemitraan strategis. Melalui proyek infrastruktur, penyaluran *Official Development Assistance* (ODA), serta peningkatan hubungan diplomatik dan ekonomi, Jepang berusaha menjaga pengaruhnya dan membangun kepercayaan jangka panjang dengan Indonesia. Namun, keberhasilan pendekatan ini juga bergantung pada respons dan kebijakan domestik pemerintah Indonesia, termasuk dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan dinamika rivalitas kekuatan besar.<sup>29</sup>

#### **b. Implementasi FOIP di Vietnam**

Sebagai salah satu mitra utama Jepang di Asia Tenggara, Vietnam menempati posisi strategis dalam kerangka *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP). Letaknya yang berada di pesisir Laut Cina Selatan serta kedekatannya dengan jalur pelayaran internasional menjadikan Vietnam sangat relevan dalam upaya Jepang memperkuat konektivitas maritim dan stabilitas kawasan. FOIP dirancang tidak hanya sebagai alat diplomatik, tetapi juga sebagai sarana geoekonomi untuk

---

<sup>28</sup> Luttwak, Edward N. "From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce." *The National Interest*, no. 20, 1990, pp. 17–23.

<sup>29</sup> Nishihara, Masashi. *The Free and Open Indo-Pacific Strategy and Its Implications for ASEAN*. Tokyo Foundation for Policy Research, 2020.

memperluas jangkauan strategis Jepang di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Vietnam.<sup>30</sup>

Hubungan bilateral antara Jepang dan Vietnam telah mengalami perkembangan signifikan selama beberapa dekade terakhir, terutama dalam bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan keamanan. Jepang telah menjadi salah satu donor terbesar *Official Development Assistance* (ODA) bagi Vietnam, dan melalui FOIP, Jepang berupaya mempromosikan pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi yang mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, serta keberlanjutan.<sup>31</sup> Upaya ini terlihat dari berbagai proyek strategis seperti pembangunan pelabuhan, kawasan industri, hingga dukungan penguatan rantai pasok regional yang berfokus pada peningkatan konektivitas ekonomi antara Vietnam dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya.<sup>32</sup>

Selain itu, FOIP juga digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas maritim Vietnam dalam menghadapi dinamika keamanan di Laut Cina Selatan. Melalui pelatihan, transfer teknologi, dan penyediaan kapal patroli, Jepang berperan dalam mendukung Vietnam mengembangkan kemampuan penegakan hukum lautnya, yang sejalan dengan prinsip tatanan internasional berbasis aturan (*rules-based order*).<sup>33</sup> Sehingga, FOIP tidak hanya memperkuat posisi Jepang di kawasan, tetapi juga mendorong Vietnam untuk menjadi bagian integral dari strategi regional yang menjunjung prinsip inklusivitas, keterbukaan, dan kerja sama multilateral.<sup>34</sup>

### **c. Implementasi FOIP di Filipina**

---

<sup>30</sup> Hosoya, Yuichi. "FOIP and Beyond: Japan's Strategic Vision for the Indo-Pacific." *Asia-Pacific Review*, vol. 27, no. 1, 2020, pp. 18–31.

<sup>31</sup> Ministry of Foreign Affairs of Japan. "Partnership between Japan and Vietnam under the Free and Open Indo-Pacific." *MOFA Japan*, 2024, [www.mofa.go.jp](http://www.mofa.go.jp).

<sup>32</sup> Japan International Cooperation Agency (JICA). "Quality Infrastructure Investment in Vietnam." *JICA Report*, 2023, [www.jica.go.jp](http://www.jica.go.jp).

<sup>33</sup> Tanaka, Akihiko. "Japan's Security Cooperation with Vietnam in the FOIP Era." *East Asia Forum*, 2022.

<sup>34</sup> ISEAS–Yusof Ishak Institute. *The State of Southeast Asia 2025: Survey Report*. ISEAS, 2025.

Filipina merupakan salah satu negara utama dalam implementasi strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) Jepang di Asia Tenggara, baik dari perspektif geoekonomi maupun geopolitik. Kedekatan geografis Filipina dengan Laut Tiongkok Selatan menjadikannya aktor strategis dalam menjaga stabilitas kawasan yang menjadi pusat konflik maritim akibat klaim sepihak Tiongkok melalui *Nine-Dash Line*.<sup>35</sup> Sebagai negara penggugat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dan sekutu dekat Amerika Serikat, Filipina menjadi mitra penting dalam upaya Jepang untuk memperkuat tatanan berbasis hukum dan keterbukaan kawasan melalui FOIP.<sup>36</sup>

Dari sisi geoekonomi, Jepang telah memanfaatkan skema *Official Development Assistance* (ODA) untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Filipina, termasuk proyek-proyek transportasi perkotaan, pelabuhan, dan penguatan konektivitas antarwilayah.<sup>37</sup> Strategi ini tidak hanya ditujukan untuk mempererat hubungan bilateral, tetapi juga sebagai bentuk kompetisi terhadap pengaruh *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok yang turut menysasar proyek-proyek serupa di negara tersebut.<sup>38</sup>

Implementasi FOIP di Filipina juga mencerminkan bagaimana Jepang mengadaptasi pendekatannya sesuai dengan dinamika politik domestik di bawah pemerintahan yang berbeda. Dalam konteks ini, respons pemerintah Filipina, baik pada masa Presiden Rodrigo Duterte yang cenderung akomodatif terhadap Tiongkok maupun era Ferdinand Marcos Jr. yang lebih terbuka terhadap aliansi tradisional, menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan diplomasi strategis Jepang melalui FOIP di kawasan.<sup>39</sup> Pembahasan selanjutnya akan

---

<sup>35</sup> Nishihara, Masashi. "The Philippines' Role in the Indo-Pacific Strategy: A View from Japan." *Asia-Pacific Review*, vol. 26, no. 2, 2019, pp. 15–32.

<sup>36</sup> Panda, Jagannath P. "FOIP vs. BRI: Strategic Competition and Southeast Asia's Hedging Approach." *Journal of Asian Security and International Affairs*, vol. 10, no. 1, 2023, pp. 7–25.

<sup>37</sup> Japan International Cooperation Agency. *JICA Annual Report 2023: Philippines Country Report*, JICA, 2023.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> CSIS Southeast Asia Program. "Marcos and the United States: Resetting the Alliance?" *Center for Strategic and International Studies*, 2023.

menguraikan lebih dalam mengenai tiga aspek utama implementasi FOIP Jepang di Filipina.

Dengan memperhatikan dinamika strategi FOIP dan tantangan-tantangan implementasinya di Asia Tenggara, dapat disimpulkan bahwa efektivitas FOIP sebagai strategi geoekonomi Jepang dalam menyeimbangkan pengaruh Tiongkok masih menghadapi hambatan struktural, politik, dan finansial. Meskipun FOIP berhasil menawarkan alternatif normatif yang dapat diterima sebagian negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, keberhasilan jangka panjangnya sangat bergantung pada kemampuan Jepang untuk menyesuaikan pendekatan dengan konteks domestik masing-masing negara mitra, meningkatkan efektivitas kelembagaan, serta memperkuat sinergi antaraktor dalam kerangka kerja sama Indo-Pasifik.

## **KESIMPULAN**

Strategi geoekonomi Jepang melalui inisiatif *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) telah menjadi respons yang terukur terhadap ekspansi pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Tenggara pada periode 2020–2024. Dengan mengedepankan pendekatan non-militer melalui kerja sama infrastruktur, investasi, dan penguatan nilai-nilai demokrasi serta keterbukaan, Jepang membentuk kerangka kerja sama yang berupaya menyeimbangkan pengaruh dominan Tiongkok di kawasan. Tiga negara utama yang menjadi fokus, yaitu; Indonesia, Filipina, dan Vietnam menunjukkan posisi strategis tidak hanya dari segi geografis, tetapi juga dalam menentukan arah keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara.

FOIP telah memperkuat posisi Jepang sebagai mitra pembangunan yang kredibel, terutama melalui prinsip *quality infrastructure*, transparansi anggaran, keberlanjutan lingkungan, serta komitmen pada supremasi hukum dan stabilitas regional. Jepang memanfaatkan jalur ekonomi dan diplomasi untuk mendorong keterlibatan kawasan dalam tatanan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dengan cara yang halus namun berorientasi strategis. Strategi ini menjadi bentuk *soft balancing* yang sesuai dengan

logika neorealisme, di mana kekuatan ekonomi dimobilisasi untuk tujuan politik dan keamanan tanpa perlu konfrontasi militer langsung.

Namun, efektivitas FOIP masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental. Ketidaksesuaian antara retorika dan implementasi di lapangan (*say-do gap*), keterbatasan fiskal Jepang, hingga perbedaan nilai dan sistem politik dengan negara-negara di Asia Tenggara menjadi faktor penghambat utama. Ketegangan antara idealisme Jepang dan realitas politik domestik mitra regional, seperti kasus Myanmar atau fluktuasi politik di Filipina, memperlihatkan bahwa pendekatan yang terlalu normatif tidak selalu dapat diterapkan secara universal. Di sisi lain, ketidaksinkronan narasi antara FOIP versi Jepang dan pendekatan dari Amerika Serikat maupun Quad, membuat kerja sama kawasan kadang kehilangan fokus dan harmoni.

Pada tingkat negara, respons terhadap FOIP juga sangat bervariasi. Indonesia cenderung berhati-hati karena sikap politik luar negeri yang bebas-aktif serta kompleksitas birokrasi nasional. Filipina mengalami pasang surut kebijakan tergantung pada orientasi pemerintahan, dari sikap pro-Tiongkok era Duterte hingga pergeseran kembali ke arah Jepang dan Amerika Serikat di bawah Marcos Jr. Sementara itu, Vietnam menunjukkan sambutan yang positif namun tetap menjaga jarak aman demi mempertahankan otonomi kebijakan luar negerinya dari pengaruh eksternal.

FOIP tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga alat strategis Jepang untuk menjaga relevansi regionalnya dalam menghadapi persaingan kekuatan besar. Dalam konteks teori geoekonomi, strategi ini mencerminkan upaya Jepang menggunakan instrumen ekonomi sebagai perpanjangan tangan kepentingan politik dan keamanan. Sementara itu, dari perspektif neorealisme, FOIP memperlihatkan upaya pengimbangan kekuatan yang tidak berbasis militer, melainkan melalui tata kelola, nilai, dan keterhubungan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan dan dinamika kawasan, strategi FOIP tetap menyimpan potensi besar untuk menjadi pilar kerja sama Indo-Pasifik yang inklusif dan stabil. Keberhasilan jangka panjangnya akan sangat bergantung pada kemampuan Jepang untuk menjaga komitmen fiskal dan politik, beradaptasi dengan kebutuhan

domestik negara mitra, serta memperkuat sinergi dengan aktor eksternal tanpa kehilangan karakter khas yang menjadikannya alternatif kredibel bagi model pembangunan Tiongkok.

## REFERENSI

- A Chinese Naval Base in Cambodia Signals a New Era of Competition in the Asia-Pacific Region.* *Time*, 9 June 2022.
- ASEAN. "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific." ASEAN Secretariat, 2019. [↵](#)
- ASEAN. *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)*. ASEAN Secretariat, 2019. [https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific\\_FINAL\\_22062019.pdf](https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf)
- Asia Society. "The Rise of China's Economy." *Asia Society*, 2023. <https://asiasociety.org/policy-institute/rise-chinas-economy> [↵](#)
- Bharti, Neelam, and Kumari, Rachana. "China's Economic Diplomacy Through the Belt and Road Initiative in Indo-Pacific Region." *Asia Pacific Journal of Regional Science*, SpringerLink, 2024. <https://link.springer.com/article/10.1007/s41685-024-00375-6> [↵](#)
- Céline Pajon, "Japan in Southeast Asia: Looking for a Balanced Indo-Pacific", Institut français des relations internationales (IFRI), 11 Desember 2019, <https://www.ifri.org/en/publications/publications-ifri/articles-ifri/japan-south-east-asia-looking-balanced-indo-pacific>.
- "China's maritime expansion has shifted the balance of power in the Indo-Pacific region..." *Journal of Global Peace and Security Studies*, vol. 4, no. 1, 2023.
- CSIS Southeast Asia Program. "Marcos and the United States: Resetting the Alliance?" *Center for Strategic and International Studies*, 2023.
- Hosoya, Yuichi. "FOIP 2.0: The Evolution of Japan's Free and Open Indo-Pacific Strategy." *Asia-Pacific Review* 27, no. 2 (2020): 18–28.
- Hosoya, Yuichi. "FOIP and Beyond: Japan's Strategic Vision for the Indo-Pacific." *Asia-Pacific Review*, vol. 27, no. 1, 2020, pp. 18–31.
- Ichihara, Maiko. "Japan's FOIP and Southeast Asia: Between Power and Principles." *The Pacific Review* 35, no. 3 (2022): 482–506.
- ISEAS–Yusof Ishak Institute. *The State of Southeast Asia 2025: Survey Report*. ISEAS, 2025.
- Japan International Cooperation Agency (JICA). "Quality Infrastructure Investment in Vietnam." *JICA Report*, 2023, [www.jica.go.jp](http://www.jica.go.jp).
- Japan International Cooperation Agency. *JICA Annual Report 2023: Philippines Country Report*, JICA, 2023.

- Laotian Times. "China Becomes ASEAN's Top Trading Partner." *Laotian Times*, 2023. <https://laotiantimes.com/2023/07/05/china-becomes-aseans-top-trading-partner>
- Li, Mingjiang. "China's Rise and Regional Strategy: Power, Interdependence and Identity." *East Asian Policy*, vol. 5, no. 4, 2013, pp. 24–32. ↵
- Luttwak, Edward N. "From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce." *The National Interest*, no. 20, 1990, pp. 17–23.
- Luttwak, Edward N. *From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce*. The National Interest, no. 20, 1990, pp. 17–23.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA). *Diplomatic Bluebook 2021*, 2021.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. "Address by Prime Minister Shinzo Abe at the Opening Session of the Sixth Tokyo International Conference on African Development (TICAD VI)," 27 August 2016. [https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e\\_000496.html](https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e_000496.html)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. "Free and Open Indo-Pacific (FOIP)." *MOFA Japan*, 2023, [www.mofa.go.jp/policy/page25e\\_000278.html](http://www.mofa.go.jp/policy/page25e_000278.html).
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. "Partnership between Japan and Vietnam under the Free and Open Indo-Pacific." *MOFA Japan*, 2024, [www.mofa.go.jp](http://www.mofa.go.jp).
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. *Free and Open Indo-Pacific (FOIP)*. MOFA Japan, 2022. [https://www.mofa.go.jp/policy/page25e\\_000278.html](https://www.mofa.go.jp/policy/page25e_000278.html)
- National Development and Reform Commission. "Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road." *Government of the People's Republic of China*, 28 Mar. 2015, [en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330\\_669367.html](http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html).
- Nishihara, Masashi. "The Philippines' Role in the Indo-Pacific Strategy: A View from Japan." *Asia-Pacific Review*, vol. 26, no. 2, 2019, pp. 15–32.
- Nishihara, Masashi. *The Free and Open Indo-Pacific Strategy and Its Implications for ASEAN*. Tokyo Foundation for Policy Research, 2020.
- Panda, Jagannath P. "FOIP vs. BRI: Strategic Competition and Southeast Asia's Hedging Approach." *Journal of Asian Security and International Affairs*, vol. 10, no. 1, 2023, pp. 7–25.
- Rolland, Nadège. *China's Eurasian Century? Political and Strategic Implications of the Belt and Road Initiative*. National Bureau of Asian Research, 2017.
- Salidjanova, Nargiza, and Iacob Koch-Weser. "China's Economic Ties with ASEAN: A Country-by-Country Analysis." U.S.-China Economic and Security Review Commission, 2015.
- Sato, Yoichiro. "Japan's ODA and Strategic Engagement in Southeast Asia." *East Asia Forum*, 17 Aug. 2021, [www.eastasiaforum.org](http://www.eastasiaforum.org).
- Smith, Sheila A. "Japan's Strategic Balancing in Southeast Asia: FOIP vs. BRI." *Journal of Asian Security and International Affairs*, vol. 10, no. 1, 2023, pp. 56–78.

- Stromseth, Jonathan. "Don't Make Us Choose: Southeast Asia in the Throes of US-China Rivalry." *Brookings Institution Report*, 2019. <https://www.brookings.edu/articles/dont-make-us-choose-southeast-asia-in-the-throes-of-us-china-rivalry> ↵
- Suehiro, Akira. "Japan's FOIP Strategy and Southeast Asia: In Search of a Regional Cooperation Framework." *Journal of Contemporary East Asia Studies* 9, no. 2 (2020): 177–195.
- Tanaka, Akihiko. "Japan's Security Cooperation with Vietnam in the FOIP Era." *East Asia Forum*, 2022.
- Walt, Stephen M. *The Origins of Alliances*. Cornell Studies in Security Affairs, Cornell University Press, 1987.
- Waltz, Kenneth N. *Theory of International Politics*. McGraw-Hill, 1979.
- Zhao, Suisheng. "China's Belt and Road Initiative and the Global Economy." *Journal of Contemporary China* 28, no. 119 (2019): 319–335.